



Integrasi Nilai Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Islam

Sita Masirri Nurviani^{1*}, Ulil Albab², Heri Sutopo³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: smasirri@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze how the integration of Islamic economic values operates in the management of School Operational Assistance (BOS) funds in Islamic schools and to identify supporting and inhibiting factors, as well as stakeholders' perceptions regarding the application of sharia values in financial administrative practices. The research employs a qualitative descriptive approach using data reduction, data display, and conclusion drawing stages. The findings reveal that Islamic economic principles such as amanah (trustworthiness), sidq (honesty), al-'adl (justice), and mas'uliyah (accountability) have been internalized within the organizational culture and individual behavior of school managers, although not yet fully institutionalized. Supporting factors include religious leadership, Islamic ethical organizational culture, and community participation, while the main constraints involve limited human resources, low literacy in sharia accounting, and the absence of a faith-based monitoring system. Stakeholders demonstrate a strong moral awareness of sharia values but with limited technical understanding. The study concludes that effective integration requires synergy between spiritual values, technical capacity, and institutional policies to establish transparent and socially just financial governance in Islamic education institutions.*

Keywords: *Sharia Economic Values; BOS Fund Management; Islamic Education; Financial Governance; Islamic Ethics.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi nilai ekonomi syariah berjalan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah Islam, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik administratif keuangan sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah seperti amanah, kejujuran (sidq), keadilan (al-'adl), dan tanggung jawab (mas'uliyah) telah diinternalisasi dalam budaya organisasi dan perilaku individu pengelola sekolah, meskipun belum sepenuhnya terlembagakan secara sistemik. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan religius, budaya organisasi berbasis etika Islam, dan partisipasi masyarakat, sedangkan penghambatnya mencakup keterbatasan sumber daya manusia, literasi akuntansi syariah yang rendah, dan belum adanya sistem pengawasan berbasis nilai Islam. Persepsi pemangku kepentingan menunjukkan kesadaran moral yang tinggi, namun masih terbatas pada dimensi etika spiritual. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai spiritual, kapasitas teknis, dan kebijakan kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan Islam yang transparan dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Etika Islam; Nilai Ekonomi Syariah; Pendidikan Islam; Pengelolaan Dana BOS; Tata Kelola Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Sekolah Operational Assistance (Dana BOS) di Indonesia merupakan program pemerintah yang bertujuan meringankan beban biaya operasional sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan (Banding, 2024). Pemerintah melalui regulasi (Permendikbud/Permendiknas) mengatur tata cara perencanaan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengelolaan Dana BOS sering menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat manajemen sekolah maupun dalam proses administrasi keuangan (Banding, 2024). Beberapa kendala yang umum terjadi meliputi keterbatasan

kemampuan sumber daya manusia dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan, keterlambatan penyaluran dana, serta ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana. Di sisi lain, kompleksitas sistem pelaporan keuangan seringkali menimbulkan kesulitan bagi sekolah dalam memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat (Suherman & Sutisman, 2025).

Selain itu, dinamika perubahan kebijakan pemerintah terkait mekanisme pengelolaan Dana BOS turut memengaruhi efektivitas implementasinya di lapangan (Sari & Handa, 2025). Peralihan sistem pelaporan berbasis manual ke sistem digital seperti BOS Online, misalnya, di satu sisi memberikan kemudahan dalam monitoring dan pelaporan, namun di sisi lain menuntut kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital dari pihak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program Dana BOS tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga pada kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian seperti “Implementation of School Financial Management System in Managing the BOS Fund” menunjukkan bahwa pengelolaan BOS pada beberapa sekolah telah berjalan dengan sistem yang relatif baik dalam aspek perencanaan, distribusi, dan evaluasi (Santosa & Munastiwi, 2022). Namun, literatur juga mengindikasikan bahwa ketidakefektifan masih terjadi terutama pada transparansi, kontrol internal, dan pelaporan keuangan (Hartini et al., 2024).

Kajian tentang sekolah Islam (Madrasah/Islamic Schools) memperlihatkan adanya upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan, termasuk pengelolaan keuangan. Studi “Implementation of School Operational Assistance Fund Management in Improving the Quality of Education in Madrasah Ibtidaiyah” mengemukakan bahwa nilai-nilai seperti amanah, mas’uliyah, shiddiq, tabligh, dan itqan mendukung integritas dalam praktik keuangan di sekolah Islam (A. Hidayat et al., 2025). Selain itu, artikel “Optimizing School Operational Assistance (Dana BOS) Management to Improve the Quality of Islamic Education in Indonesia” menekankan bahwa pengelolaan BOS pada sekolah Islam yang mengadopsi pelaporan digital, audit eksternal, dan evaluasi kinerja lebih transparan dan akuntabel (Ummi, 2025).

Dari sisi teori ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-‘adl*), kejujuran (*sidq*), amanah, transparansi, dan larangan riba adalah fundamental dalam fiqh mu‘amalah. Literatur internasional dan nasional menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik atau lembaga pendidikan harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah agar tidak hanya legal formal tetapi juga etis dan moral (Azwar et al., 2022). Perdebatan akademik muncul terkait seberapa jauh

prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara nyata dalam kebijakan publik dan pelaksanaan administratif, terutama ketika dana BOS bersifat reguler dan dikontrol pemerintah.

Fakta sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa meskipun sekolah Islam memperoleh dana BOS yang sama dengan sekolah umum, persepsi masyarakat sering mengeluhkan kurangnya transparansi penggunaan dana dan laporan keuangan yang tidak detail. Beberapa sekolah Islam belum secara eksplisit menyebut nilai-nilai syariah dalam mekanisme pengelolaan dana, meskipun staf dan kepala sekolah menyadari pentingnya nilai-nilai tersebut. Misalnya, penelitian di Tasikmalaya memperlihatkan bahwa pengawasan dan pelaporan keuangan oleh sekolah Islam belum maksimal dan situasi SD Islam menunjukkan variasi dalam pelibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan keuangan (Sujaya, 2022).

Kondisi geografis, kapasitas sumber daya manusia, dan perbedaan antara sekolah Islam di kota dan di daerah terpencil juga mempengaruhi integrasi prinsip-prinsip syariah. Sekolah di kota cenderung memiliki akses teknologi dan pelatihan manajerial yang lebih baik, memungkinkan adopsi sistem pelaporan digital dan audit eksternal, sementara sekolah di daerah terpencil sering kesulitan dalam sumber daya, pengawasan, serta pemahaman tentang ekonomi syariah dan penerapannya dalam administrasi keuangan (Ummi, 2025).

Selain itu, regulasi pemerintah terkait BOS mengharuskan sekolah untuk mengelola dana sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan, laporan penerimaan dan pengeluaran, serta akuntabilitas. Namun literatur menunjukkan bahwa pelaporan formal sering hanya mencakup laporan kas masuk dan keluar serta dokumentasi minim, tidak meliputi laporan posisi keuangan, neraca atau jurnal penyesuaian sebagaimana standar akuntansi syariah (Tarmiati & Febriani, 2024). Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah sekolah Islam yang mengelola BOS sudah melakukan integrasi nilai syariah secara mendalam atau hanya secara simbolik.

Beberapa penelitian telah fokus pada manajemen BOS secara umum, misalnya terkait efisiensi, transparansi, pemanfaatan fasilitas, atau pengaruh terhadap kualitas pendidikan. Studi di SDN Palipurna menganalisis penggunaan BOS dalam mewujudkan sekolah efektif, termasuk perencanaan dan evaluasi; studi di MIN Bandung menambah elemen nilai-nilai Islam dalam praktik pengelolaan (Soro et al., 2025). Namun sedikit yang secara spesifik mengkaji integrasi nilai ekonomi syariah (termasuk konsep fiqh mu‘amalah, maqasid al-syariah) dalam seluruh aspek pengelolaan dana BOS oleh sekolah Islam, dari perencanaan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Debat akademik juga muncul tentang tingkat kekonsistenan antara teori dan praktik: beberapa penulis menyatakan bahwa prinsip syariah sulit diimplementasikan secara penuh karena ketentuan regulasi pemerintah yang bersifat konvensional, misalnya standar laporan

keuangan nasional, juknis BOS, audit pemerintah yang tidak selalu memperhitungkan aspek syariah. Lainnya menyebut resistensi internal seperti kurangnya pemahaman staf atau kelemahan kapasitas SDM sebagai hambatan.

Fakta empiris memperlihatkan bahwa murid, orang tua, dan masyarakat terkadang tidak memperoleh laporan pertanggungjawaban yang lengkap dalam format yang bisa mereka pahami, atau laporan hanya tersedia formalitas saja (Marinah et al., 2023). Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah Islam dipengaruhi, dan hal ini mengarah pada tuntutan untuk pengelolaan yang tidak hanya legal tetapi juga moral dan syariah.

Gap penelitian terlihat pada kurangnya studi lapangan yang mendalami bagaimana nilai-nilai syariah diintegrasikan secara sistematis dalam pengelolaan dana BOS dalam konteks sekolah Islam yang berbeda. Penelitian terdahulu sebagian besar bersifat deskriptif, membahas praktik saat ini, namun minim yang mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan (kepala sekolah, komite, guru, orang tua) tentang prinsip syariah, dan bagaimana tantangan dan strategi pengintegrasian nilai-nilai tersebut.

Gap lain: belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif mendalam (wawancara, observasi partisipatif) yang mengkaji aspek fiqih mu'amalah dan maqasid al-syariah dalam pengelolaan dana publik pendidikan seperti BOS. Juga kurang penelitian yang membandingkan implementasi di beberapa daerah dengan latar konteks budaya dan sumber daya berbeda untuk melihat variabilitas.

Penelitian yang ada belum banyak memetakan faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat integrasi nilai ekonomi syariah dalam proses administratif dana BOS, termasuk aspek regulasi, kapabilitas SDM, teknologi informasi, partisipasi masyarakat, serta modal sosial.

Penelitian juga belum mendefinisikan secara operasional indikator integrasi nilai syariah dalam pengelolaan dana BOS, misalnya: apakah ada penggunaan akad-akad syariah dalam kontrak sekolah, laporan keuangan sesuai standar syariah, keadilan distribusi alokasi dana, evaluasi berdasarkan maqasid al-syariah, dan pelibatan stakeholder sesuai prinsip syura.

Dalam konteks regulasi nasional, BOS diatur oleh Juknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum secara spesifik mensyaratkan integrasi nilai-nilai syariah selain akuntabilitas dan transparansi umum. Kepatuhan biasanya hanya pada aspek legal formal, bukan etik syariah yang lebih mendalam. Konsekuensi sosial dari tidak adanya integrasi syariah secara jelas: potensi distrust (ketidakpercayaan) dari masyarakat Islam terhadap sekolah Islam, penggunaan dana yang bisa dianggap tidak sesuai nilai-nilai moral Islam, dan hilangnya kesempatan sekolah Islam untuk menjadi teladan dalam praktik ekonomi syariah.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini penting untuk mengisi gap dengan mengkaji secara kualitatif bagaimana integrasi nilai ekonomi syariah berjalan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah Islam, berbagai faktor pendukung dan penghambatnya, serta persepsi pemangku kepentingan terkait nilai-nilai syariah dalam praktik administratif keuangan BOS.

2. KAJIAN TEORITIS

Integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pengelolaan keuangan institusi pendidikan perlu dikaji dari landasan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menempatkan tujuan syariah sebagai tolok ukur kebijakan ekonomi dan sosial. Kerangka *maqāṣid* menekankan pemeliharaan lima *maqāṣid* utama agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) sehingga kebijakan keuangan publik atau lembaga pendidikan dievaluasi tidak hanya berdasarkan efisiensi tetapi juga keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan mafsadah (Sumidartiny, 2025). Literatur terkini menegaskan relevansi *maqāṣid* untuk mengharmonisasikan norma-norma syariah dengan praktik kontemporer dalam sektor keuangan dan institusi sosial, termasuk pendidikan, sehingga pengelolaan dana seperti BOS dapat dipandang melalui lensa tujuan etis dan normatif syariah.

Kerangka *fiqh al-mu‘āmalāt* memperkaya kajian dengan ketentuan operasional tentang transaksi, akad, transparansi, dan akuntabilitas yang relevan bagi tata kelola dana lembaga. Prinsip amanah, *sidq* (jujur), *tadbir* (manajemen), dan *hisbah* (pengawasan) menawarkan standar perilaku administratif yang konkret untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana publik di sekolah Islam. Kajian praktik *fiqh mu‘āmalāt* dalam konteks lembaga mikrokeuangan dan wakaf menunjukkan bahwa penguatan mekanisme akuntabilitas dan keterbukaan dapat meningkatkan legitimasi dan kepatuhan pemangku kepentingan; implikasi tersebut dapat ditransformasikan ke ranah pengelolaan BOS dengan menyesuaikan bentuk akuntansi dan audit agar mencerminkan kaidah syariah (Rahmawati et al., 2025).

Studi-studi empiris mengenai pengelolaan dana BOS di Indonesia menyediakan pijakan kontekstual penting. Penelitian-penelitian nasional mengidentifikasi tantangan yang konsisten berupa kelemahan transparansi, variasi kapabilitas sumber daya manusia, serta keterbatasan format pelaporan yang lebih menekankan kepatuhan administratif formal ketimbang nilai-nilai etis atau syariah. Temuan tersebut mengindikasikan terjadinya jarak antara regulasi juknis BOS dan praktik tata kelola yang ideal, terutama di sekolah Islam yang memiliki tuntutan nilai keagamaan tambahan. Hasil kajian ini menunjukkan perlunya desain indikator dan prosedur pengelolaan yang menjembatani standar administratif nasional dengan prinsip-prinsip ekonomi

syariah agar pengelolaan dana BOS menjadi akuntabel sekaligus bernilai religious (Rachmawati, 2023).

Telaah komparatif antara kerangka normatif (maqāsid dan fiqh mu‘āmalāt) dan studi lapangan menandai celah teoritis dan praktis yang harus dijembatani penelitian lebih lanjut. Gap teoritis terletak pada minimnya operationalisasi indikator integrasi nilai syariah untuk pengelolaan dana publik pendidikan, sedangkan gap empiris menyangkut ketiadaan studi kualitatif lintas-konteks yang menelaah persepsi pemangku kepentingan, strategi implementasi, dan hambatan institusional secara mendalam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus multisitus karena fokus utama terletak pada pemahaman mendalam terhadap proses, makna, dan konteks integrasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan dana BOS di sekolah Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri dinamika interaksi sosial, praktik administratif, dan persepsi para pemangku kepentingan secara komprehensif. Metode kualitatif tepat digunakan untuk mengungkap fenomena yang kompleks, kontekstual, dan sulit dikuantifikasi (Sugiyono, 2019). Studi dilakukan di dua sekolah Islam yang memiliki karakteristik berbeda yaitu SD IT Az Zahra, desa Tanjung waras, kec. Natar, kab. Lampung selatan dan MI al ikhlas, desa Tanjung sari, kec. Natar, kab. Lampung selatan. untuk memperoleh variasi konteks pengelolaan dan penerapan nilai syariah yang lebih representatif.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder (Abizar; Ulil Albab; Dkk, 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi administratif, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan keuangan, pedoman juknis BOS, dan dokumen kebijakan internal sekolah. Informan kunci meliputi kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua siswa yang terlibat dalam proses perencanaan serta pelaporan dana BOS. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengetahuannya terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Data dikumpulkan melalui teknik *triangulasi sumber* dan *triangulasi metode* untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2020).

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data agar interpretasi dapat berkembang secara dinamis sesuai temuan lapangan. Data hasil wawancara dan observasi dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan prinsip ekonomi syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan praktik aktual pengelolaan BOS dengan kerangka teoritis *maqāsid al-syarī'ah* dan *fiqh mu'āmalāt*. Kredibilitas hasil penelitian diperkuat melalui *member checking*, diskusi sejawat, dan audit trail, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang valid, kontekstual, dan aplikatif bagi pengembangan tata kelola keuangan pendidikan berbasis syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Nilai Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Dana Bos di Sekolah Islam

Pelaksanaan penelitian mengenai integrasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah Islam bertujuan menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab diterapkan dalam praktik manajemen keuangan pendidikan. Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa dana BOS bukan sekadar bantuan operasional pemerintah, tetapi juga amanah publik yang harus dikelola sesuai nilai moral dan spiritual Islam. Pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman memungkinkan peneliti menelusuri makna, persepsi, dan pengalaman para pemangku kepentingan di dua sekolah Islam, yaitu SD IT Az Zahra dan MI Al Ikhlas di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan ini digunakan agar fenomena integrasi nilai syariah dapat dipahami secara mendalam, bukan hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari dimensi sosial dan etis yang menyertainya.

Hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen menunjukkan adanya variasi praktik dan persepsi mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana BOS. Proses reduksi data menghasilkan kategori-kategori tematik yang menggambarkan sejauh mana nilai-nilai syariah diinternalisasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Tahap display data kemudian menyajikan pola interaksi sosial dan budaya organisasi sekolah yang memengaruhi praktik keuangan, sedangkan tahap penarikan kesimpulan membantu mengungkap makna substantif di balik perilaku keuangan yang tampak di permukaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, bagian berikut memaparkan secara naratif bagaimana integrasi nilai ekonomi syariah berjalan dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah

Islam dengan menguraikan fakta-fakta empiris, pandangan narasumber, dan temuan teoritik yang relevan.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah Islam berjalan secara gradual dan berlapis antara aspek administratif dan spiritual. Proses reduksi data menunjukkan bahwa kedua sekolah, SD IT Az Zahra dan MI Al Ikhlas di Kecamatan Natar, memiliki pola pengelolaan yang serupa dalam mematuhi juknis BOS nasional, tetapi berbeda dalam menafsirkan nilai-nilai syariah dalam praktiknya. SD IT Az Zahra menekankan dimensi amanah dan transparansi sebagai bentuk ibadah, sedangkan MI Al Ikhlas lebih menonjolkan aspek keadilan sosial dan keterbukaan kepada masyarakat. Perbedaan ini menegaskan bahwa integrasi nilai syariah tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh kultur organisasi dan karakter kepemimpinan masing-masing sekolah.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa kepala sekolah berperan sentral dalam membumikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam tata kelola keuangan. Kepala SD IT Az Zahra menyatakan, *“Kami menganggap setiap rupiah dari BOS adalah titipan amanah. Penggunaan dana ini tidak hanya kami pertanggungjawabkan kepada pemerintah, tetapi juga kepada Allah.”* Pernyataan ini menggambarkan adanya kesadaran spiritual dalam pengelolaan dana publik. Temuan ini sesuai dengan pandangan Al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulumuddin* bahwa amanah merupakan pilar utama keberkahan harta dan pengelolaan yang adil membawa maslahat bagi umat. Nilai amanah menjadi landasan etis yang menghubungkan aspek regulatif dan religious (Hayati et al., 2025).

Analisis data menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan dana BOS di kedua sekolah telah mengikuti pedoman Kementerian Pendidikan, namun belum sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi syariah seperti yang diatur dalam PSAK 109 tentang entitas nirlaba. Bendahara MI Al Ikhlas menjelaskan, *“Kami mencatat semua pengeluaran dengan teliti, tetapi belum memahami laporan keuangan berbasis syariah. Yang penting bagi kami adalah tidak ada dana yang disalahgunakan.”* Fakta ini menunjukkan bahwa orientasi moral lebih dominan dari pada pemahaman teknis akuntansi syariah. Integrasi ekonomi syariah menuntut keselarasan antara niat etis dan sistem pelaporan yang sesuai prinsip keadilan (*al-’adl*) dan kejujuran (*sidq*) (Arwani, 2016).

Fakta sosial di lapangan memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat berperan besar dalam menjaga transparansi dana BOS. Rapat komite sekolah dilakukan setiap triwulan untuk melaporkan penggunaan dana kepada orang tua. Salah satu anggota komite SD IT Az Zahra menyebutkan, *“Kami tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tapi juga membahas manfaatnya bagi siswa.”* Aktivitas ini menggambarkan penerapan prinsip syura (musyawarah)

dan *mas'uliyah* (tanggung jawab sosial). Studi (Ummi, 2025) menyebutkan bahwa praktik musyawarah publik dalam lembaga pendidikan Islam memperkuat legitimasi moral dan sosial, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan yang berkeadilan dan transparan.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) tercermin dalam alokasi dana BOS yang diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak dan menyentuh kepentingan banyak pihak. Kepala MI Al Ikhlas menegaskan bahwa, "*Kami mengutamakan kegiatan yang bermanfaat langsung untuk peserta didik, bukan kepentingan birokrasi.*" Hal ini selaras dengan pandangan Chapra (2000) yang menempatkan keadilan distributif sebagai fondasi ekonomi Islam (Febriyanti & Sapa, 2025). Distribusi dana yang adil menjadi wujud dari maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan kemaslahatan publik. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian keputusan masih dipengaruhi oleh pertimbangan kedekatan personal antar pihak sekolah dan penyedia barang, sehingga potensi bias distribusi tetap ada.

Integrasi nilai *itqan* (profesionalitas) dalam pengelolaan BOS masih menghadapi tantangan kapasitas sumber daya manusia. Beberapa guru yang merangkap tugas administratif belum memperoleh pelatihan akuntansi syariah secara memadai. Bendahara SD IT Az Zahra menyatakan, "*Kami belajar sambil jalan, belum ada pelatihan khusus tentang keuangan syariah.*" Kondisi ini sejalan dengan temuan (Ummi, 2025) bahwa profesionalitas dalam lembaga pendidikan Islam sering terhambat oleh keterbatasan literasi finansial dan manajerial. Padahal, dalam kerangka *fiqh al-mu'āmalāt*, profesionalitas merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga keadilan transaksi.

Nilai *shidq* atau kejujuran menjadi unsur dominan yang mendorong lahirnya kepercayaan publik. Observasi menunjukkan bahwa laporan keuangan dipajang di papan pengumuman sekolah dan dibacakan dalam forum wali murid. Seorang guru MI Al Ikhlas menyampaikan, "*Kami berusaha jujur dalam setiap laporan agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat.*" Transparansi ini sejalan dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Suchman (1995) bahwa keterbukaan informasi memperkuat kepercayaan sosial dan memperkecil risiko konflik kepentingan. Integrasi nilai *shidq* di sekolah Islam menjadi instrumen efektif untuk menegakkan akuntabilitas syariah berbasis kepercayaan sosial (Oktarindini et al., 2025).

Prinsip *hisbah* atau pengawasan moral belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Pengawasan masih dilakukan oleh pihak eksternal dari dinas pendidikan dan belum berbasis etika syariah. Kepala SD IT Az Zahra mengakui, "*Kami diaudit oleh pemerintah, tapi belum ada pengawasan yang menilai dari sisi nilai Islam.*" Ketidadaan sistem *hisbah* menyebabkan penegakan nilai kejujuran bergantung pada kesadaran individu, bukan mekanisme kelembagaan. Sistem pengawasan dalam ekonomi Islam harus menegakkan kontrol moral,

bukan hanya administratif, agar keadilan dan amanah dapat berjalan seimbang dalam lembaga publik.

Konteks sosial menjadi faktor yang sangat menentukan dalam integrasi nilai ekonomi syariah. Sekolah di daerah perkotaan seperti SD IT Az Zahra lebih mudah menerapkan prinsip transparansi karena dukungan teknologi dan SDM yang mumpuni. Sebaliknya, MI Al Ikhlas yang berada di lingkungan pedesaan menghadapi kendala jaringan internet dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai syariah bersifat situasional dan sangat dipengaruhi kondisi sosial ekonomi. Studi (Fuaidi, 2024) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa kualitas tata kelola keuangan berbasis nilai Islam sangat bergantung pada kekuatan modal sosial dan budaya kolektif masyarakat sekitar.

Budaya organisasi menjadi salah satu faktor kunci dalam proses integrasi nilai syariah. Sekolah dengan kepemimpinan yang visioner dan religius menampilkan pola manajemen yang lebih etis dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Kepala SD IT Az Zahra menegaskan, *"Kami ingin dana ini membawa keberkahan bagi sekolah, bukan sekadar habis digunakan."* Kepemimpinan spiritual seperti ini menginternalisasi nilai religius ke dalam manajemen keuangan. Kepemimpinan berbasis nilai spiritual mampu meningkatkan kepatuhan moral dan kepercayaan stakeholder terhadap lembaga pendidikan Islam.

Analisis hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa integrasi nilai syariah seringkali bersifat personal, bukan sistemik. Sebagian besar pegawai memahami nilai amanah dan kejujuran sebagai etika pribadi, bukan standar operasional. Guru SD IT Az Zahra mengatakan, *"Kalau keuangan itu tanggung jawab moral, kami takut kalau menyalahi."* Kesadaran moral ini perlu diperkuat dengan instrumen kelembagaan yang mengatur praktik ekonomi syariah secara terstruktur. Menurut (Rachmawati, 2023), penerapan nilai Islam dalam lembaga publik harus diikuti dengan kebijakan kelembagaan agar nilai-nilai *maqāṣid* tidak berhenti pada tataran normatif.

Dari sisi dokumentasi administratif, kedua sekolah masih menggunakan laporan konvensional sesuai format BOS nasional. Laporan hanya mencakup kas masuk dan keluar tanpa analisis *maqāṣid* atau aspek keadilan sosial. Padahal, menurut (Amsal, 2023), integrasi ekonomi syariah memerlukan instrumen pelaporan yang menggambarkan keseimbangan antara nilai material dan spiritual. Fakta ini menunjukkan adanya dualisme antara regulasi konvensional dan aspirasi syariah. Sekolah Islam perlu mengembangkan sistem pelaporan internal yang memuat indikator amanah, transparansi, dan kemaslahatan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Proses analisis data menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah sudah diupayakan melalui sikap dan perilaku para pengelola, meskipun belum diwujudkan dalam kebijakan formal. Reduksi data memperlihatkan tema dominan berupa “moral responsibility” dan “transparency with faith”. Display data memperkuat bahwa praktik syariah bersumber dari kesadaran religius individu, bukan peraturan tertulis. Penarikan kesimpulan awal menegaskan bahwa integrasi nilai ekonomi syariah pada tahap ini masih bersifat moralistik, belum struktural. Hal ini memperlihatkan pentingnya pergeseran paradigma dari *compliance-based management* menuju *value-based governance* dalam lembaga pendidikan Islam.

Interaksi antara nilai agama dan sistem administratif pemerintah menunjukkan adanya ruang negosiasi yang dinamis. Sekolah Islam berusaha mematuhi juknis BOS agar tidak melanggar regulasi, namun tetap menanamkan nilai Islam dalam prosesnya. Guru MI Al Ikhlas menyampaikan, “*Kami mengikuti aturan pemerintah, tapi tetap menjaga agar penggunaan dana tidak keluar dari nilai Islam.*” Fenomena ini sesuai dengan pandangan (R. Hidayat, 2025) bahwa penerapan prinsip syariah dalam kebijakan publik modern sering kali menuntut keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai etis Islam. Integrasi ini berlangsung dalam konteks adaptif dan progresif.

Analisis akhir menegaskan bahwa integrasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah Islam belum sepenuhnya sistematis tetapi telah menunjukkan arah positif. Prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sudah menjadi praktik sosial, sementara keadilan distributif dan pengawasan syariah masih perlu diperkuat. Hambatan utama terletak pada keterbatasan SDM, minimnya regulasi pendukung, dan ketiadaan mekanisme hisbah internal. Penguatan kapasitas manajerial, pelatihan akuntansi syariah, serta penyusunan pedoman maqāṣid-based reporting diperlukan agar sekolah Islam mampu menjalankan fungsi keuangan secara efisien, adil, dan sesuai nilai-nilai Islam.

Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Nilai Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Dana BOS

Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat integrasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah Islam dilakukan untuk memahami sejauh mana nilai-nilai Islam tidak hanya diinternalisasikan dalam tataran ideologis, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik manajerial dan administratif. Melalui proses reduksi data, peneliti menelaah secara mendalam hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Dinamika interaksi antara faktor internal dan eksternal yang membentuk pola pengelolaan Dana BOS berbasis nilai syariah. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh

pemahaman yang komprehensif tentang elemen-elemen yang mendukung keberhasilan serta kendala yang menghambat penerapan nilai-nilai syariah dalam tata kelola keuangan sekolah Islam.

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa faktor utama yang mendukung integrasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah Islam adalah kepemimpinan yang berorientasi religius dan partisipatif. Kepala sekolah di SD IT Az Zahra menegaskan, *“Kami memulai semua perencanaan dengan niat ibadah agar setiap keputusan membawa keberkahan.”* Kepemimpinan berbasis nilai spiritual ini menciptakan iklim kerja yang amanah, transparan, dan penuh tanggung jawab. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Sulaiman & Barat, 2025) bahwa kepemimpinan yang berakar pada nilai keislaman menjadi motor utama internalisasi prinsip syariah dalam lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, nilai moral kepala sekolah berperan sebagai penggerak integrasi etika ke dalam praktik manajerial dan keuangan sekolah.

Faktor pendukung lain yang teridentifikasi melalui display data adalah budaya organisasi yang menanamkan nilai gotong royong dan rasa tanggung jawab kolektif. Guru MI Al Ikhlas menyatakan, *“Kami merasa terlibat bersama, tidak hanya bendahara atau kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap dana BOS.”* Kesadaran kolektif ini merefleksikan prinsip *mas’uliyah* (tanggung jawab bersama) dalam ekonomi Islam. Budaya organisasi yang terbentuk dari nilai religiusitas memperkuat kejujuran dan solidaritas antar staf sekolah. Studi (Ummi, 2025) menunjukkan bahwa lingkungan organisasi berbasis spiritualitas memperkuat etika kerja dan mendorong akuntabilitas sosial. Dengan demikian, integrasi nilai syariah tidak hanya bersumber dari regulasi, tetapi juga dari internalisasi budaya kerja Islami.

Keterlibatan masyarakat melalui komite sekolah juga menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi dan legitimasi pengelolaan Dana BOS. Komite SD IT Az Zahra menyampaikan, *“Kami selalu dilibatkan dalam setiap pembahasan anggaran agar tidak ada salah paham di kemudian hari.”* Praktik ini memperkuat prinsip *syura* (musyawarah) yang merupakan salah satu pilar dalam tata kelola keuangan Islam. Menurut (Hamid, 2024), partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan menumbuhkan rasa kepercayaan dan mengurangi potensi moral hazard. Kolaborasi antara pihak sekolah dan masyarakat menjadikan transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral bersama.

Dari sisi kebijakan, dukungan pemerintah daerah melalui pelatihan BOS Online dan pendampingan teknis juga menjadi faktor eksternal yang memperkuat efektivitas pengelolaan dana di sekolah Islam. Bendahara MI Al Ikhlas menyampaikan, *“Kami sering mendapat*

bimbingan teknis dari dinas, itu sangat membantu memahami pelaporan BOS yang benar.” Dukungan ini sejalan dengan penelitian (Wulaningsih & Asriati, 2024) yang menjelaskan bahwa kapasitas teknis pengelola keuangan berpengaruh langsung terhadap transparansi dan efisiensi penggunaan dana publik. Fasilitasi pemerintah dalam bentuk pelatihan dan supervisi teknis memungkinkan sekolah Islam mengadopsi sistem akuntansi yang lebih profesional sambil tetap menjaga integritas nilai syariah dalam setiap tahap pengelolaan.

Faktor penghambat yang muncul dari hasil reduksi data meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman akuntansi syariah yang rendah, serta lemahnya sistem pengawasan berbasis nilai Islam. Kepala MI Al Ikhlas menuturkan, *“Kami belum memahami pelaporan syariah secara penuh, yang kami pahami baru laporan BOS konvensional.”* Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman regulatif dan nilai-nilai maqāsid al-syarī‘ah. Penerapan prinsip ekonomi syariah tidak dapat efektif tanpa kompetensi teknis dan spiritual yang seimbang. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah bagi tenaga pendidik agar nilai amanah dan keadilan dapat diterapkan dalam sistem manajerial secara terukur (Syafri et al., 2025).

Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi penghambat signifikan terutama di sekolah dengan akses digital yang rendah. Bendahara SD IT Az Zahra mengungkapkan, *“Kendala jaringan sering membuat kami terlambat mengunggah laporan BOS Online.”* Fakta ini memperlihatkan bahwa integrasi nilai syariah yang menekankan efisiensi (*itqan*) sulit diwujudkan tanpa dukungan sarana memadai. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan pendidikan Islam membutuhkan dukungan teknologi dan manajemen data yang baik. Ketimpangan infrastruktur antara sekolah perkotaan dan pedesaan turut memengaruhi keseragaman penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana public (Yusuf, 2023).

Penarikan kesimpulan dari hasil analisis memperlihatkan bahwa faktor pendukung utama integrasi nilai ekonomi syariah berasal dari kepemimpinan religius, budaya organisasi yang etis, dan dukungan partisipatif masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya terletak pada keterbatasan SDM, infrastruktur, dan sistem pengawasan berbasis syariah. Integrasi nilai syariah berjalan efektif ketika kombinasi antara kompetensi teknis dan moral spiritual berjalan seimbang. Keberhasilan implementasi ekonomi syariah di lembaga publik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kesadaran etis dan nilai religius yang menggerakkan perilaku individu (Mansur, 2021). Dengan demikian, memperkuat kapasitas moral, teknis, dan struktural merupakan kunci keberlanjutan pengelolaan dana BOS yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Persepsi Pemangku Kepentingan Terkait Nilai-Nilai Syariah dalam Praktik Administratif Keuangan Dana BOS

Analisis terhadap persepsi para pemangku kepentingan dilakukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariah dipahami, dimaknai, dan diterapkan dalam praktik administratif pengelolaan Dana BOS di sekolah Islam. Persepsi ini penting karena menjadi refleksi sejauh mana prinsip-prinsip syariah tidak hanya diterima secara normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam sistem keuangan dan budaya organisasi sekolah. Melalui proses reduksi data, hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kategori persepsi moral, spiritual, dan administratif, kemudian ditampilkan (display data) untuk melihat pola pemahaman dan pengalaman antar aktor. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menelaah hubungan antara persepsi individu, nilai kelembagaan, serta konteks sosial yang melingkupinya, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang posisi nilai-nilai syariah dalam tata kelola keuangan sekolah Islam.

Reduksi data menunjukkan bahwa persepsi para pemangku kepentingan kepala sekolah, guru, bendahara, komite, dan wali murid terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik administratif keuangan BOS mencerminkan kesadaran moral yang tinggi, meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman konseptual yang mendalam. Kepala SD IT Az Zahra menyampaikan, *“Nilai syariah bagi kami adalah kejujuran dan amanah, jadi setiap rupiah harus digunakan untuk kemaslahatan pendidikan.”* Pandangan ini menegaskan bahwa nilai-nilai syariah lebih dipahami sebagai etika moral daripada sistem administrasi formal. Hasil ini sejalan dengan temuan (Muzakki, 2023) yang menyebutkan bahwa penerapan ekonomi syariah di lembaga pendidikan sering berakar pada nilai spiritual individu sebelum berkembang menjadi kebijakan kelembagaan.

Display data memperlihatkan adanya variasi persepsi antar kelompok pemangku kepentingan. Guru dan bendahara menekankan aspek tanggung jawab dan transparansi, sedangkan komite dan orang tua lebih menyoroti aspek kejujuran serta manfaat dana BOS terhadap kualitas pendidikan. Seorang guru MI Al Ikhlas menuturkan, *“Kami mengelola dana dengan hati-hati agar tidak menyalahi aturan dan tetap sesuai nilai Islam.”* Pernyataan ini menggambarkan adanya kesadaran spiritual yang menjadi dasar perilaku administratif. Temuan ini sejalan dengan (Amsal, 2023), yang menegaskan bahwa nilai spiritual dalam sistem ekonomi Islam bertujuan menyeimbangkan antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab moral terhadap Allah serta masyarakat.

Fakta sosial yang teridentifikasi di lapangan menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai syariah terbentuk melalui pengalaman kolektif dan budaya organisasi sekolah. Kepala MI Al Ikhlas menegaskan bahwa, *“Keuangan sekolah kami jaga agar tidak menimbulkan prasangka, karena keterbukaan itu bagian dari dakwah.”* Pandangan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dianggap sebagai bentuk ibadah sosial dan bukan sekadar tuntutan administratif. Menurut (Ansari & Nurjaman, 2025), budaya kerja yang dilandasi nilai keislaman memperkuat legitimasi sosial dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan Islam. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa nilai-nilai seperti *amanah*, *sidq* (kejujuran), dan *mas’uliyah* (tanggung jawab) telah diinternalisasi dalam perilaku keseharian pengelola sekolah.

Analisis hasil wawancara juga mengungkap bahwa sebagian pemangku kepentingan masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap prinsip syariah dalam aspek teknis pelaporan. Bendahara SD IT Az Zahra menyatakan, *“Kami memahami syariah sebagai kejujuran, tetapi belum tahu cara membuat laporan keuangan syariah seperti di pesantren atau lembaga zakat.”* Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman moral dan kemampuan teknis. Menurut (Munir et al., 2024), penerapan ekonomi Islam memerlukan dua elemen utama, yaitu kesadaran etis dan kompetensi teknis agar nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah dapat diwujudkan secara praktis. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan tentang akuntansi syariah menjadi kebutuhan mendesak bagi sekolah Islam.

Penarikan kesimpulan menunjukkan bahwa persepsi pemangku kepentingan terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan BOS telah menunjukkan arah positif meskipun masih bersifat moralistik dan belum sepenuhnya sistemik. Nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab telah menjadi pedoman perilaku, namun belum terinstitusionalisasi dalam sistem administrasi keuangan sekolah. Persepsi ini menandakan adanya potensi besar bagi penguatan tata kelola keuangan berbasis maqāṣid al-syarī‘ah di masa depan. Menurut Kamali (2008), keberhasilan penerapan prinsip syariah dalam lembaga publik bergantung pada harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai moral Islam yang hidup di masyarakat. Kesadaran ini menjadi modal sosial penting bagi pengembangan tata kelola keuangan pendidikan Islam yang etis dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah Islam telah berjalan dengan arah positif meskipun belum sepenuhnya sistemik. Nilai-nilai utama seperti amanah, kejujuran (*sidq*), keadilan (*al-‘adl*), dan tanggung jawab (*mas’uliyah*) telah diinternalisasi dalam perilaku dan budaya kerja pengelola sekolah.

Implementasi nilai-nilai tersebut tampak dalam praktik transparansi, keterbukaan pelaporan, dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah (*syura*). Namun, proses integrasi masih bersifat moralistik dan bergantung pada kesadaran individu, belum diformalkan dalam mekanisme kelembagaan atau kebijakan administratif yang berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Faktor utama yang mendukung keberhasilan integrasi nilai syariah meliputi kepemimpinan religius, budaya organisasi yang etis, dan partisipasi sosial, sementara hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya literasi akuntansi syariah, dan lemahnya sistem pengawasan berbasis etika Islam.

Kesimpulan lebih lanjut mengindikasikan bahwa persepsi para pemangku kepentingan terhadap nilai-nilai syariah masih dominan pada tataran etika moral, belum menyentuh aspek teknokratis pelaporan dan akuntansi syariah. Upaya integrasi memerlukan penguatan kapasitas teknis melalui pelatihan manajemen keuangan syariah, pengembangan sistem pelaporan berbasis *maqāṣid*, serta pembentukan mekanisme *hisbah* atau pengawasan internal yang menilai aspek moral dan spiritual dalam penggunaan dana publik pendidikan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan ekonomi syariah dalam pengelolaan Dana BOS tidak hanya bergantung pada kepatuhan regulatif terhadap juknis pemerintah, tetapi juga pada harmonisasi nilai spiritual, budaya organisasi, dan sistem administrasi modern. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan dan pelatihan kelembagaan berbasis nilai Islam perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sekolah Islam dapat menjadi model tata kelola keuangan publik yang transparan, adil, dan berkeadilan sosial sesuai prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Abizar, U., & Albab, U. (Eds.). (2023). *Metode penulisan karya ilmiah* (Cetakan pertama). PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Amsal, D. (2023). Laporan keuangan syariah sebagai wujud tanggung jawab sosial dan spiritual untuk menjaga integritas keuangan dalam ekosistem ekonomi Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 254–266.
- Ansari, N. R., & Nurjaman, U. (2025). Relevansi pengembangan nilai-nilai Islami dalam bidang manajemen pendidikan. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 66–78. <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v3i1.9656>
- Arwani, A. (2016). Konstruksi hukum ekonomi syariah dalam fiqh anggaran yang berbasis akuntansi syariah. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.279>

- Azwar, A., Usman, A. H., & Abdullah, M. F. R. (2022). Islamic economics education in Indonesia: Quranic view and epistemological problems analysis. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 7(2), 982–993. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v7i2.350>
- Banding, M. P. (2024). *Meningkatkan kinerja sekolah melalui dana BOS: Analisis efektivitas*. Mega Press Nusantara.
- Febriyanti, R., & Sapa, N. B. (2025). Keadilan distributif dan peran negara menurut M. Umer Chapra: Analisis terhadap konsep dan implementasinya. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 63–75. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.1883>
- Fuaidi, I. (2024). Nilai ekonomi syariah sebagai dasar strategi pemberdayaan masyarakat. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(1), 95–108. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.1128>
- Hamid, A. M. (2024). *Tata kelola keuangan Islam pada sekolah Islam*. Academia Publication.
- Hartini, S., Wartini, S., & Mulawarman, W. G. (2024). Management of educational funds through school operational assistance (BOS) in elementary schools in Sempaja Subdistrict. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar*, 4(2), 1–9. (Nama jurnal sementara — perlu verifikasi)
- Hayati, F., Zahra, A. A., Anggraini, W., Afriyanti, Y., & Mutiara, A. (2025). *Pemikiran ekonomi Al-Ghazali*. Penerbit NEM. (Penerbit sementara — perlu verifikasi)
- Hidayat, A., Nuryana, M. L., Zulfa, A. A., & Luthfia, A. D. (2025). Implementation of school operational assistance fund management in improving the quality of education in Madrasah Ibtidaiyah. *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 17(1), 113–139. <https://doi.org/10.18326/mudarrisa.v17i1.3612>
- Hidayat, R. (2025). Dinamika pemikiran ekonomi syariah dalam menjawab realitas ekonomi modern. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 209–224. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.2000>
- Mansur, J. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Marinah, M., Abdullah, M. R., & Saleh, M. (2023). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan dana operasional sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 79–92. <https://doi.org/10.24256/kelola.v8i1.3746>
- Munir, M. M., Chusnan, M., & Fadliah, I. R. (2024). *Manusia berkualitas: Reparadigma manajemen sumber daya manusia perspektif maqasid al-syari'ah*. Penerbit NEM.
- Muzakki, Z. (2023). Integrasi ilmu ekonomi Islam dan pendidikan agama Islam era society 5.0. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, 2(1), 51–74. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.327>
- Oktarindini, D., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Keterbukaan informasi dalam perjanjian perdata: Implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 3040–3053.

- Rachmawati, U. (2023). Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SDN Made 1 Surabaya. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(2), 212–219. <https://doi.org/10.57008/jjp.v3i02.442>
- Rahmawati, A., Azril, I., Agustiana, A. Y., Andriesgo, J., Gustia, A., Mukhlisin, M., & Wahyuni, S. E. (2025). Prinsip pengelolaan keuangan sekolah dalam perspektif Islam. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(2), 299–317.
- Santosa, S., & Munastiwi, E. (2022). The implementation of school financial management system in managing the BOS fund. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 12(2), 145–155. <https://doi.org/10.24042/alidarrah.v12i2.10905>
- Sari, D., & Handa, M. I. (2025). *Efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Penerbit NEM.
- Soro, S. H., Astuti, D., Juhariah, C., & Suro, S. H. (2025). Analysis of the use of BOS funds in creating effective schools (Case study at SDN Palipurna). *Global Education Journal*, 3(2), 147–254. <https://doi.org/10.59525/gej.v3i2.348>
- Sugiyono, S. (2019). *Metode penelitian pendidikan (Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan)*. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Suherman, M., & Sutisman, E. (2025). Efektivitas manajemen pembiayaan sekolah dalam penggunaan Dana BOS di SDN Babakan Tanjung. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 220–226.
- Sujaya, K. (2022). Financing management in Islam-based schools in the city of Tasikmalaya. *Dinamika Ilmu*, 22(2), 507–527. <https://doi.org/10.21093/di.v22i2.6386>
- Sulaiman, T. S., & Barat, S. (2025). Gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah berbasis nilai-nilai Islam. *Jurnal Al-Hasib: Manajemen Pendidikan Islam*, 1(4). (Nama jurnal perlu verifikasi manual jika tersedia versi daring)
- Sumidartiny, A. N. (2025). Pengelolaan harta keluarga dalam kerangka maqasid syariah menuju keseimbangan dan keberkahan. *J-DBS: Journal of Darunnajah Business School*, 2(1), 39–48.
- Syafri, M., Sylvani, S., Kemala, R., Sudirman, D., & Al-Amin, A.-A. (2025). Manajemen sumber daya insani dalam bisnis syariah: Perspektif pendidikan dan pengembangan kompetensi karyawan. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 188–209. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.260>
- Tarmiati, M., & Febriani, D. (2024). The urgency and practice of governance and accountability in Islamic boarding school: Principal and accountant perception. *Jurnal Governance & Islamic Education*, 2(1), 102–118. (Nama jurnal sementara — perlu verifikasi)

- Umami, F. (2025). Optimizing School Operational Assistance (Dana BOS) Management to Improve the Quality of Islamic Education in Indonesia. *Journal of Islamic Education Management Research*, 3(1), 1–9.
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>
- Yusuf, M. (2023). Inovasi teknologi finansial (Fintech) dalam pengelolaan keuangan institusi pendidikan Islam. *Diksi: Jurnal Pendidikan dan Literasi*, 2(2), 159–182. <https://doi.org/10.62719/diksi.v2i2.41>